

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 ini disusun mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 berisi kebijakan pengawasan baik yang terkait dengan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa, demikian juga yang terkait dengan kebijakan intern, hubungan dengan auditi (obyek pengawasan), hubungan dengan sesama aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dan auditor eksternal (BPK), maupun dengan masyarakat.

Proses penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 memperhatikan rancangan renstra Inspektorat 2018-2023 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang akan dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
21. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah menyediakan acuan secara umum yang akan dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2023 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
- b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 pada tahun ke-5 (ke-lima) periode tahun 2023; dan
- c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023.

1.4. Sistematika

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 pada dasarnya pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan juga terhadap kegiatan lainnya dilakukan secara Internal dan Eksternal.

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang menjadi tanggungjawab dan atau oleh Pejabat Atasan Langsung terhadap bawahannya sebagai pelaksana di masing-masing Unit/Satuan Kerja juga disebut Pengawasan Melekat (Waskat). Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat di luar tanggungjawab SKPD.

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Nganjuk secara Internal oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk, sedangkan Pengawasan secara Eksternal dilaksanakan oleh Pengawasan Fungsional yaitu BPK-RI, BPKP, Inspektorat Jendral Depdagri dan Inspektorat Propinsi.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Inspektorat yaitu pembinaan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Desa serta Pelaksanaan Pembangunan yang sifatnya Reguler/Rutin.

- Untuk memperoleh kepastian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan akuntabel, pengawasan merupakan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan bukan hanya bersifat penindakan (Represif) tetapi juga bersifat pencegahan (Preventif). Hasil pengawasan yang dilakukan akan dapat mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan Pengawasan yang akuntabel, dengan cara:

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan”.

Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dimaksud untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan diukur dengan indikator :

“Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP sesuai standar”

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan 2022, pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
(Target Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan									
	Fungsi Penunjang Pengawasan									
	Bidang Pengawasan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota	Hasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90%	100%	85%	80%	100%	90%	90%	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	90%	-	90%	90%	100%	85%	85%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA_SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-

					dokumen perubahan DPA-SKPD								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	-	-	-	-	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100%	-	100%	95%	95%	100%	100%	100%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	54 orang	-	-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	108 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	52 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	6 laporan	-	-	-	-	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%	-	80%	90%	112%	80%	80%	100%
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	-	-	-	-	-	-	-

			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang	-	-	-	-	-	-	-
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 orang	-	-	-	-	-	-	-
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40 orang	-	-	-	-	-	-	-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	90%	-	90%	90%	100%	90%	90%	100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	-	-	-	-	-	-	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	-	-	-	-	-	-	-
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	85%	-	80%	100%	125%	80%	80%	100%
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	-	-	-	-	-	-	-

				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	35 unit	-	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 unit	-	-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah	90%	-	90%	90%	100%	90%	90%	100%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	90%	-	90%	80%	88%	90%	90%	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 unit	-	-	-	-	-	-	-
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30 unit	-	-	-	-	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	-	-	-	-	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 unit	-	-	-	-	-	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PKPT yang dilaksanakan	100%	-	100%	90%	90%	100%	100%	100%
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya pengawasan internal	100%	-	96%	85%	88%	100%	100%	100%
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8 laporan	-	-	-	-	-	-	-
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	10 laporan	-	-	-	-	-	-	-

				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2 laporan	-	-	-	-	-	-	-
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 laporan	-	-	-	-	-	-	-
				Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 laporan	-	-	-	-	-	-	-
				Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	-	-	-	-	-	-	-
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	6 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	-	100%	88%	88%	95%	95%	100%
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	80%	-	75%	60%	60%	80%	80%	100%
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	-	-	-	-	-	-	-
				Pendampingan dan Asistensi	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	90%	-	85%	80%	80%	85%	85%	100%
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	50 OPD	-	-	-	-	-	-	-
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan	30 OPD	-	-	-	-	-	-	-

					penilaian reformasi birokrasi								
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	50 OPD	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.2

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
(Target Berdasarkan Pemetaan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan									
	Fungsi Penunjang Pengawasan									
	Bidang Pengawasan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90%	100%	85%	80%	100%	90%	90%	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	90%		90%	90%	100%	85%	85%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*)	2 dokumen		-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen		-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD*)	1 dokumen		-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen		-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 dokumen		-	-	-	-	-	-

					dokumen perubahan RKA-SKPD*)								
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*)	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD*)	1 dokumen		-	-	-	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*)	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD*)	1 dokumen		-	-	-	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu	7 laporan		8 laporan	8 laporan	100%	7 laporan	7 laporan	100%
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*)	7 laporan		-	-	-	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah	1 dokumen		-	-	-	-	-	-
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah*)	1 laporan		-	-	-	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100%		100%	95%	95%	100%	100%	100%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan		12 bulan	11 bulan	92%	12 bulan	12 bulan	100%
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*)	54 orang/bln		-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi	13 orang		-	-	-	-	-	-
					Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN*)	62 dokumen		-	-	-	-	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	2 orang		-	-	-	-	-	-

					Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*)	52 dokumen		-	-	-	-	-	-
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*)	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD*)	4 dokumen		-	-	-	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
					Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD*)	1 laporan		-	-	-	-	-	-
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen permintaan pemeriksaan	2 jenis		-	-	-	-	-	-
					Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan*)	2 dokumen		-	-	-	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu	6 laporan		-	-	-	-	-	-
					Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD*)	6 laporan		-	-	-	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%		80%	90%	112%	80%	80%	100%
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	50 orang		-	-	-	-	-	-
					Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan*)	162 paket		-	-	-	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	APIP yang mengikuti pelatihan	50 orang		45 orang	45 orang	100%	45 orang	45 orang	100%
					Terlaksananya senam secara rutin	11 bulan		11 bulan	7 bulan	70%	11 bulan	11 bulan	100%

					Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*)	54 orang		-	-	-	-	-	-
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi	30 orang		40 orang	40 orang	100%	-	-	-
					Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan*)	30 orang		-	-	-	-	-	-
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP B dan BB	50 OPD		40 OPD	40 OPD	100%	-	-	-
					Jumlah pendampingan yang dilakukan	3 kali		3 kali	3 kali	100%	-	-	-
					Jumlah peserta bimtek	40 orang		40 orang	40 orang	100%	40 orang	40 orang	100%
					Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan*)	54 orang		-	-	-	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	90%		90%	90%	100%	90%	90%	100%
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik	20 jenis		15 jenis	15 jenis	100%	-	-	-
					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan*)	2 paket		-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan kebutuhan kantor yang diadakan	22 buah		15 buah	15 buah	100%	16 buah	16 buah	100%
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*)	9 paket		-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan alat rumah tangga	20 jenis		15 jenis	15 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
					Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan*)	2 paket		-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang diadakan	40 jenis		25 jenis	25 jenis	80%	25 jenis	25 jenis	100%

					Tersedianya makan dan minum	11 bulan		11 bulan	10 bulan	90%	11 bulan	11 bulan	100%
					Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*)	4 paket		-	-	-	-	-	-
				Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan yang berbasis elektronik	1 paket		-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	7 jenis cetakan dan 30.000 penggandaan		30.000 lembar	25.000 lembar	83%	4 jenis cetakan dan 6.520 penggandaan	4 jenis cetakan dan 6.520 penggandaan	100%
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan*)	2 paket		-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangan yang diadakan	6 jenis		1 jenis	1 jenis	100%	-	-	-
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan*)	1 dokumen		-	-	-	-	-	-
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu yang diadakan	11 bulan		11 bulan	10 bulan	90%	11 bulan	11 bulan	100%
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu*)	11 laporan		-	-	-	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat yang diadakan	11 bulan		11 bulan	10 bulan	90%	11 bulan	11 bulan	100%
					Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan/dihadiri	36 kegiatan		36 kegiatan	36 kegiatan	83%	36 kegiatan	36 kegiatan	100%
					Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan	50 OPD		50 OPD	50 OPD	100%	-	-	-
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*)	36 laporan		-	-	-	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya pengamanan arsip di Perangkat Daerah	1 kegiatan		-	-	-	-	-	-
					Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD*)	1 dokumen		-	-	-	-	-	-

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	85%		80%	100%	125%	80%	80%	100%
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan*)	3 unit		-	-	-	-	-	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan*)	35 unit		-	-	-	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang diadakan	20 buah		16 buah	16 buah	100%	9 buah	9 buah	100%
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan*)	94 unit		-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah	90%		90%	90%	100%	90%	90%	100%
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses	850 surat		700 surat	650 surat	92%	800 surat	800 surat	100%
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat*)	4 laporan		-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan listrik dan telepon	12 bulan		12 bulan	11 bulan	90%	12 bulan	12 bulan	100%
					Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan*)	4 laporan		-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan	12 bulan		12 bulan	11 bulan	90%	12 bulan	12 bulan	100%
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*)	4 laporan		-	-	-	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	90%		90%	80%	88%	90%	90%	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan,, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenadaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	20 unit		20 unit	20 unit	100%	15 unit	15 unit	100%
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	15 unit		-	-	-	-	-	-

					pajak dan perizinannya*)								
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit		20 unit	10 unit	50%	-	-	-
					Jumlah mebel yang dipelihara*)	30 unit		-	-	-	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	37 unit		37 unit	30 unit	81%	9 unit	9 unit	100%
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara*)	45 unit		-	-	-	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	1200 m2		1200 m2	1200 m2	100%	1200 m2	1200 m2	100%
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi*)	16 unit		-	-	-	-	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PKPT yang dilaksanakan	100%		100%	90%	90%	100%	100%	100%
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya pengawasan internal	100%		96%	85%	88%	100%	100%	100%
				Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	8 OPD		96%	100%	104%	8 OPD	8 OPD	100%
					Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah*)	8 laporan		-	-	-	-	-	-
				Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	10 OPD		96%	90%	93%	10 OPD	10 OPD	100%
					Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah*)	10 laporan		-	-	-	-	-	-
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen LKjIP yang direviu	-		1 dokumen	-	0%	-	-	100%
					Jumlah dokumen LPPD yang direviu	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja*)	1 laporan		-	-	-	-	-	-

				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen LKPD yang direviu	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					Jumlah OPD yang direviu	30 OPD		50 OPD	50 OPD	100%	30 OPD	30 OPD	100%
					Jumlah dokumen PBJ yang direviu	50 dokumen		-	-	-	50 dokumen	50 dokumen	100%
					Jumlah dokumen RKA PD	50 dokumen		50 OPD	50 OPD	100%	50 dokumen	50 dokumen	100%
					Jumlah dokumen RKPD yang direviu	-		-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%
					Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan*)	119 laporan		-	-	-	-	-	-
				Pengawasan Desa	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	264 desa		96%	100%	104%	40%	40%	100%
					Jumlah laporan hasil pengawasan desa*)	20 laporan		-	-	-	-	-	-
				Kerjasama Pengawasan Internal	Gelar Pengawasan yang dilakukan	1 kali		1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kali	1 kali	100%
					Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Sisdurwas	300 ASN		300 ASN	100 ASN	30%	-	-	-
					Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk*)	1 kesepakatan		-	-	-	-	-	-
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inventarisasi kode temuan hasil pengawasan	100%		90%	90%	100%	100%	100%	100%
					Jumlah evaluasi yang dilakukan	4 kali		4 kali	3 kali	75%	4 kali	4 kali	100%
					Tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang selesai	95%		90%	80%	88%	95%	95%	100%
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP*)	6 dokumen		-	-	-	-	-	-

				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	95%		100%	88%	88%	95%	95%	100%
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Pelimpahan kasus yang ditangani	90%		90%	85%	94%	90%	90%	100%
					Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani*)	4 laporan		-	-	-	-	-	-
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kasus pengaduan yang ditangani	96%		96%	90%	94%	96%	96%	100%
					Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor	4 OPD					10 OPD	10 OPD	100%
					Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu*)	4 laporan		-	-	-	-	-	-
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	80%		100%	60%	60%	80%	80%	100%
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Pengawasan yang disusun	2 dokumen		-	-	-	-	-	-
					Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun*)	2 rekomendasi		-	-	-	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Cakupan klinik konsultasi	6 kecamatan		6 kecamatan	8 kecamatan	133%	-	-	-
					Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun*)	1 rekomendasi		-	-	-	-	-	-
				Pendampingan dan Asistensi	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	90%		85%	80%	80%	85%	85%	100%
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Evaluasi dan pemantauan SPIP	30 OPD		30 OPD	13 OPD	45%	50 dokumen	50 dokumen	100%
					Jumlah ekspose pengawasan komprehensif	15 kali		24 kali	5 kali	20%	-	-	100%

					Jumlah dokumen SAKIP yang dievaluasi	50 dokumen		50 dokumen	50 dokumen	100%	50 dokumen	50 dokumen	100%
					Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah*)	50 OPD		-	-	-	-	-	-
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi	50 OPD		50 OPD	50 OPD	100%	50 OPD	50 OPD	100%
					Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi*)	30 OPD		-	-	-	-	-	-
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah pelaporan gratifikasi pada perangkat daerah yang ditangani	100%		50%	-	-	-	-	100%
					Terlaksananya asistensi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi	14 OPD		85%	58%	68%	14 OPD	14 OPD	100%
					Terlaksananya pembinaan dan koordinasi satgas saber pungli	12 bulan		12 bulan	11 bulan	91%	12 bulan	12 bulan	100%
					Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi*)	3 kegiatan		-	-	-	-	-	-
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakkan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang didampingi	50 OPD		50 OPD	50 OPD	100%	50 OPD	50 OPD	100%
					Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas*)	50 OPD		-	-	-	-	-	-

Catatan: *) Sub kegiatan dan indikator sub kegiatan berdasarkan pemutakhiran kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Capaian Kinerja

Nilai	Kategori	Warna	Notifikasi
≥ 80%	Tercapai	Hijau	
60% - 79%	Kurang Tercapai	Kuning	
≤ 59%	Tidak Tercapai	Merah	

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Program (Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)	Notifikasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

a. Adanya refocusing yang membuat anggaran dan berkurang sehingga target pada kegiatan kurang tercapai.

- b. Pembayaran rekening listrik dan telepon untuk tagihan rekening akhir Desember 2021 belum dibayarkan, akan tetapi sudah dianggarkan untuk pembayaran bulan Januari 2022.
- c. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah masih belum 100%, karena pengaduan yang masuk pada akhir tahun 2021 dan diselesaikan pada tahun 2022.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	10	10	13
1	Prosentase Rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti		√	85,5%	86%	86,5%	86%	92,46%	
2	Prosentase tindak lanjut temuan yang selesai		√	95%	95%	95%	95%	94,17%	
3	Prosentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A.	√		10%	15%	20%	15%	16%	
4	Persentase penyelesaian pengaduan publik		√	90%	90%	90%	90%	96,66%	
5	Prosentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai			85%	85%	90%	85%	78,52%	
6	Level Kapabilitas APIP	√		2	2	2	3	2	
7	Persentase PKPT yang dilaksanakan			100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	√		86%	90%	90%	90%	90%	
9	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	√		70%	75%	75%	75%	75%	
10	Cakupan Klinik Konsultasi			80%	80%	85%	80%	85%	
11	Jumlah auditor yang bersertifikat	√		16	16	16	16	16	

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Perubahan Renstra

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart			NA	28%	32%	NA	NA	28%	32%

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Meskipun dari hasil pengukuran tingkat capaian kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan tercapai, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang disebabkan :

- a. Personil
 - Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah dan Auditor hanya berjumlah 22 Orang;
 - Jabatan Fungsional Pranata Komputer hanya berjumlah 1 Orang;
 - Staf untuk membantu di 4 Irbanwil 5 Orang;
- b. Pendanaan
 1. Biaya operasional dan insentif belum menunjang untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, namun senantiasa dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung kinerja organisasi.
- c. Sarana – Prasarana
 - 1) Kendaraan roda – 2 dan roda – 4 masih kurang untuk kepentingan operasional;
 - 2) Kurangnya bangunan penunjang untuk keamanan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - 3) Kurangnya almari arsip untuk penyimpanan berkas dokumen-dokumen penting Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk;
 - 4) Belum adanya *Closed-circuit television (CCTV)* untuk keamanan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk pemeriksaan/pengawasan pelaksanaannya dibantu oleh Staf yang ada di Irbanwil Inspektorat daerah Kabupaten Nganjuk;
- b. Untuk pelaksanaan pada Sekretariat mengoptimalkan Staf yang ada, sehingga pekerjaan tidak dapat maksimal;
- c. Mengefektifkan tenaga kontrak dalam operasional kegiatan Inspektorat.

Disamping upaya-upaya tersebut telah direncanakan program pengembangan yaitu :

- a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Study Banding bagi seluruh karyawan/ti Inspektorat daerah Kabupaten Nganjuk;

- b. Pengiriman karyawan/ti untuk mengikuti Diklat/ Workshop untuk menambah wawasan mengenai pengawasan.

2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut:

2.3.2.1 Tantangan

- a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN.
- b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
- c. Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
- d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD.
- e. Kapabilitas pengawasan internal pemerintah belum berada pada level 3, maka perlu meningkatkan *quality assurance* dan *consulting* pada APIP.
- f. Berlakunya Permendagri 90 Tahun 2019 berakibat pada berubahnya kegiatan dan program Inspektorat sehingga diperlukan penyesuaian atas hal tersebut.

2.3.2.2 Peluang

- 1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
- 2. Dukungan dari KPK-RI terkait pencegahan korupsi melalui program (Monitoring Control for Prevention) MCP, Strategi Nasional (Stranas) KPK-RI dan Survei Penilaian Integritas (SPI)
- 3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang terus mendorong ke arah transparansi pengelolaan Keuangan Daerah
- 4. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.

5. Dukungan dari Inspektorat Provinsi dengan adanya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK), Perluasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).
6. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
7. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (*early warning system*) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
8. Sinergisitas APIP dengan APH

2.3.3 Isu-Isu Penting dan Strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya, yang signifikan bagi Inspektorat adalah:

- a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN.
- b. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- c. Rendahnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP).
- d. Struktur kelembagaan APIP kurang mendukung Independensi dan Obyektivitas dalam pelaksanaan pengawasan.
- e. Peran APIP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum efektif.
- f. Tuntutan terhadap peningkatan Kapabilitas APIP.
- g. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam pengawasan intern bagi tata kelola pemerintahan belum memadai.

2.3.4 Dampak Pandemi COVID-19

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-*

treatment, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Gambar 2.1
Perkembangan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk
Periode Januari 2022



Sumber: Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD telah sesuai dengan Usulan Matrik Pembangunan pada Renstra Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, termasuk Program, Kegiatan, Sasaran, Target dan Anggaran. Matrik Usulan Pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Nganjuk
Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90%	11.721.177,930	Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90%	11.721.177,930	
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	90%	21.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	90%	21.000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	6.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	6.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	15.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	15.000	

5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100%	7.204.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100%	7.204.000	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	54 orang/bln	7.200.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	54 orang/bln	7.200.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	4.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	4.000	
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%	635.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%	635.000	
9	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	162 paket	85.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	162 paket	85.000	
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dll	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54 orang	350.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dll	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54 orang	350.000	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	54 orang	200.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	54 orang	200.000	

12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	90%	589.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	90%	589.000	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	15.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	15.000	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	15.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	15.000	
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	10.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	10.000	
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	170.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	170.000	
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	50.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	50.000	
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	9.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	9.000	
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	20.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	20.000	
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	250.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	250.000	

21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	50.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	50.000	
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Nganjuk	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	85%	2.347.677,930	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Nganjuk	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	85%	2.347.677,930	
23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 unit	1.150.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 unit	1.150.000	
24	Pengadaan Mebel	Kabupaten Nganjuk	Jumlah paket mebel yang disediakan	35 unit	120.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Nganjuk	Jumlah paket mebel yang disediakan	35 unit	120.000	
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Nganjuk	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	94 unit	1.077.677,930	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Nganjuk	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	94 unit	1.077.677,930	
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah	90%	224.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah	90%	224.500	
27	Penyediaan jasa surat menyurat	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	9.500	Penyediaan jasa surat menyurat	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	9.500	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	150.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	150.000	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	65.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	65.000	
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase sarana dan prasarana	90%	700.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase sarana dan prasarana	90%	700.000	

	Daerah		aparatur yang laik fungsi			Urusan Pemerintahan Daerah		aparatur yang laik fungsi			
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenadaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenadaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	250.000	
32	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	30 unit	25.000	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	30 unit	25.000	
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	75.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	75.000	
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 unit	350.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 unit	350.000	
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase PKPT yang dilaksanakan	100%	1.315.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase PKPT yang dilaksanakan	100%	1.315.000	
36	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Terselenggaranya pengawasan internal	100%	995.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Terselenggaranya pengawasan internal	100%	995.000	
37	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8 laporan	200.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8 laporan	200.000	
38	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	10 laporan	70.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	10 laporan	70.000	

39	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk dan Wilayah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2 laporan	25.000	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk dan Wilayah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2 laporan	25.000	
40	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk dan Wilayah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 laporan	50.000	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk dan Wilayah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 laporan	50.000	
41	Pengawasan Desa	Kabupaten Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 laporan	200.000	Pengawasan Desa	Kabupaten Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 laporan	200.000	
42	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Nganjuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	150.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Nganjuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	150.000	
43	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Nganjuk, Surabaya	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	6 dokumen	300.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Nganjuk, Surabaya	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	6 dokumen	300.000	
44	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Nganjuk	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	320.000	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Nganjuk	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	320.000	
45	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Nganjuk	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	4 laporan	200.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Nganjuk	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	4 laporan	200.000	
46	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 laporan	120.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 laporan	120.000	

47	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Nganjuk	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	80%	695.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Nganjuk	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	80%	695.000	
48	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Nganjuk	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%	150.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Nganjuk	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%	150.000	
49	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 rekomendasi	50.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 rekomendasi	50.000	
50	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	100.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	100.000	
51	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Nganjuk	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	90%	545.000	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Nganjuk	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	90%	545.000	
52	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	50 OPD	150.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	50 OPD	150.000	
53	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian	30 OPD	100.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi	30 OPD	100.000	

			reformasi birokrasi					birokrasi			
54	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Kabupaten Nganjuk	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 kegiatan	220.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Kabupaten Nganjuk	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 kegiatan	220.000	
55	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakkan Integritas	Kabupaten Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	50 OPD	75.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakkan Integritas	Kabupaten Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	50 OPD	75.000	
TOTAL					13.731.177,930	TOTAL					13.731.177,930

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Sesuai Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Inspektorat Kabupaten Nganjuk mempunyai Tugas Pokok sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	90%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	54 orang/bln	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil	1 laporan	

			koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	162 paket	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dll	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54 orang	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	54 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	90%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Inspektorat Daerah Kab.	Jumlah dokumen penatausahaan	1 dokumen	

	SKPD	Nganjuk	arsip dinamis pada SKPD		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Nganjuk	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	85%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 unit	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Nganjuk	Jumlah paket mebel yang disediakan	35 unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Nganjuk	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	94 unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah	90%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	90%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	
	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	30 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 unit	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Persentase PKPT yang dilaksanakan	100%	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Terselenggaranya pengawasan internal	100%	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab.	Jumlah laporan hasil pengawasan	8 laporan	

		Nganjuk	kinerja pemerintah daerah		
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	10 laporan	
	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2 laporan	
	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 laporan	
	Pengawasan Desa	Kabupaten Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 laporan	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Kabupaten Nganjuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Nganjuk, Surabaya	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	6 dokumen	
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Nganjuk	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Nganjuk	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	4 laporan	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 laporan	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Nganjuk	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	80%	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Nganjuk	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 rekomendasi	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	
	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Nganjuk	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	90%	
	Pendampingan dan	Kabupaten	Jumlah perangkat	50 OPD	

	Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Nganjuk	daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah		
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	30 OPD	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Nganjuk	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 kegiatan	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	50 OPD	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran tahun 2023, maka arah kebijakan pengawasan difokuskan pada:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan
- b. menjamin mutu (*quality insurance*) atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP
- c. meningkatkan level kapabilitas APIP.
- d. Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan menggunakan analisa risiko

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja SKPD

Sesuai dengan amanat pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 untuk daerah yang belum memiliki RPJMD maka program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk melanjutkan program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah:

- Tujuan :
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan
- Sasaran :
Untuk memperoleh kepastian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan akuntabel, pengawasan merupakan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan bukan hanya bersifat penindakan (Represif) tetapi juga bersifat pencegahan (Preventif). Hasil pengawasan yang dilakukan akan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan akuntabel dengan cara :
Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik melalui Kualitas Pengawasan	Level Maturitas SPIP	Level 3
Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	32%

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Tahun 2023, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut :

3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten

Nganjuk Tahun 2022, yaitu **“Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri Dan Perdagangan Dengan Didukung Sumberdaya Manusia Dan Infrastruktur Yang Berkualitas”**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, pengendalian penduduk ,dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;
6. Peningkatan ketahanan bencana; dan
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 14 (empat belas) Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023, yang meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
2. Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10. Menjadikan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;
12. Revitalisasi bidang pertanian dan peternakan;
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif; dan

14. Pengembangan jejaring antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan.

3.3.2. Penanganan Pandemi COVID-19

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022.

Pandemi Covid-19 mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Penanganan dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk diprioritaskan pada:

1. Penanganan kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonom; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	589,000,000	0
---	----	----	------	------------------------------------	-------------	---

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023																	
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	2 paket	90 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	9 paket	90 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	2 paket	90 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	3 paket	90 %	170,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	2 paket	90 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 dokumen	90 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	12 laporan	90 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	36 laporan	90 %	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 dokumen	90 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2,347,677,930				0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	3 unit	85 %	1,150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %	0
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	35 unit	85 %	120,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %	0
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	94 unit	85 %	1,077,677,930	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %	0
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								224,500,000				0	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Persentase jasa umum dan penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	4 laporan	90 %	9,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %	0
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Persentase jasa umum dan penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	4 laporan	90 %	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %	0
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Persentase jasa umum dan penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	4 laporan	90 %	65,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %	0
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								700,000,000				0	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	15 unit	90 %	250,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %	0
6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah mebel yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	30 unit	90 %	25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	45 unit	90 %	75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %	0
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	16 unit	90 %	350,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90 %	0
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								1,315,000,000	0				
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								995,000,000	0				
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase PKPT yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Terselenggaranya pengawasan internal	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 laporan	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PKPT yang dilaksanakan	100 %	0
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase PKPT yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Terselenggaranya pengawasan internal	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 laporan	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PKPT yang dilaksanakan	100 %	0
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase PKPT yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Terselenggaranya pengawasan internal	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PKPT yang dilaksanakan	100 %	0
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase PKPT yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Terselenggaranya pengawasan internal	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	119 laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PKPT yang dilaksanakan	100 %	0
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Persentase PKPT yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Terselenggaranya pengawasan internal	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 laporan	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PKPT yang dilaksanakan	100 %	0
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase PKPT yang dilaksanakan	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Terselenggaranya pengawasan internal	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 kesepakatan	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PKPT yang dilaksanakan	100 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase PKPT yang dilaksanakan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Terselenggaranya pengawasan internal	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 dokumen	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PKPT yang dilaksanakan	100 %	0
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								320,000,000				0	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase PKPT yang dilaksanakan	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 laporan	95 %	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PKPT yang dilaksanakan	100 %	0
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase PKPT yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 laporan	95 %	120,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase PKPT yang dilaksanakan	100 %	0
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								695,000,000				0	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan								150,000,000				0	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	2 rekomendasi	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	80 %	0
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 rekomendasi	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	80 %	0
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi								545,000,000				0	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	50 OPD	90 %	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	80 %	0
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	30 OPD	90 %	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	80 %	0
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	3 kegiatan	90 %	220,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	80 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	50 OPD	90 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	80 %	0	
TOTAL													13,731,177,930				0	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2023)
1.	Penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), reformasi birokrasi dan elektronik <i>government</i> menuju pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean government</i>)	13.731.177.930

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2023)	Alokasi (2023)
1.	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	32%	13.731.177.930

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah	90%	11.721.177.930
	Perencanaan, Penganggaran dan	Persentase laporan kinerja	90%	21.000.000

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	6,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	15,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100%	7.204.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	54 orang/bln	7,200,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	4,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	80%	635.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	162 paket	85,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54 orang	350,000,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	54 orang	200,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	90%	589.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah paket komponen instalasi	2 paket	15,000,000

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	15,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	10,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	170,000,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	50,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	9,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	20,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	250,000,000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	50,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	85%	2.347,677,930
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 unit	1,150,000,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	35 unit	120,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	94 unit	1,077,677,930
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah	90%	224.500.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	9,500,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	150,000,000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	65,000,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi	90%	700.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	250,000,000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30 unit	25,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	75,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 unit	350,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PKPT yang dilaksanakan	100%	1.315.000.000
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya pengawasan internal	100%	995.000.000
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8 laporan	200,000,000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	10 laporan	70,000,000
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2 laporan	25,000,000
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 laporan	50,000,000
	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 laporan	200,000,000
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	150,000,000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	6 dokumen	300,000,000

	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	95%	320.000.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	4 laporan	200,000,000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 laporan	120,000,000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	80%	695.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%	150.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 rekomendasi	50,000,000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	100,000,000
	Pendampingan dan Asistensi	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	90%	545.000.000
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	50 OPD	150,000,000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	30 OPD	100,000,000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 kegiatan	220,000,000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan	50 OPD	75,000,000

		pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas		
--	--	---	--	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2023 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat permasalahan, yaitu :

- a. Keterbatasan waktu karena pemeriksaan khusus, permintaan joint audit dengan BPKP, Inspektorat Jendral dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Aparat Penegak Hukum (APH) serta pemeriksaan dari BPK selaku Auditor eksternal yang cukup menyita waktu, tenaga dan pemikiran, upaya semaksimal mungkin telah dilaksanakan namun tetap belum dapat menjangkau dan menyelesaikannya;
- b. Keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), karena keterbatasan tenaga pemeriksa dan personil pendukung di Irban maupun Sekretariat.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengirim tenaga pemeriksa dan seluruh tenaga pendukung mengikuti diklat-diklat yang berhubungan dengan pengawasan dan diklat-diklat lainnya, memperdalam pengetahuan di bidang pengawasan melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), sehingga mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak atas seluruh materi pengawasan.
- b. Meningkatkan efisiensi waktu dan kualitas penerbitan LHP, sehingga tidak terjadi keterlambatan penerbitan LHP.
- c. Penambahan personil tenaga pemeriksa, staf pengelola administrasi penerbitan Laporan dan pemantauan tindak lanjut, serta staf pendukung di sekretariat.
- d. Memfasilitasi agar Jabatan Fungsional segera terbentuk untuk mendukung kekurangan jumlah tenaga Auditor yang berkualitas.

- e. Upaya yang akan dilakukan agar setiap temuan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti adalah dengan cara :
- ❑ Meningkatkan dan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
 - ❑ Mengoptimalkan Gelar Pengawasan dan Evaluasi Tindak Lanjut, dengan cara mengumpulkan Obrik guna melakukan dialog dan memberikan pengarahan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga terjadi komunikasi dalam penyelesaian tindak lanjut.
 - ❑ Secara berkelanjutan melakukan pendekatan kepada SKPD yang belum menyampaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
 - ❑ Secara rutin melaksanakan penagihan kepada SKPD yang belum menyampaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
 - ❑ Melakukan sosialisasi kepada SKPD dan masyarakat terkait dengan tata cara pengaduan masyarakat.

Plt. BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI